

LAPORAN TAHUNAN

BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

TAHUN 2016



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT sehingga Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) dapat menyelesaikan Laporan Tahun 2016. Laporan ini merupakan bentuk dokumentasi pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Badan PPSDMP.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja Badan PPSDMP dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran 2016 dengan membandingkan target yang telah disusun dengan capaian dan realisasinya. Laporan ini sekaligus menjelaskan kendala dan permasalahan serta upaya-upaya penyelesaiannya.

Secara umum, target program 2016 dapat dicapai dengan baik, bahkan dalam kegiatan tertentu mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sehingga beberapa kegiatan belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini menjadi catatan bagi Badan PPSDMP untuk dapat menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan perbaikan kinerja dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan program dan anggaran tahun berikutnya.

Sistematika laporan terbagi dalam 5 (lima) bab, yaitu Bab I berisi Pendahuluan, Bab II menguraikan Organisasi dan Tata Kerja, Bab III menguraikan Program, Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan, Bab IV menguraikan Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut, serta Bab V berisi Penutup.

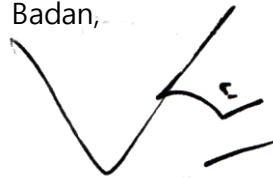
Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2016 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan sumbang saran dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*)

demi dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan ke depan sangat di harapkan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini. Kami berharap, laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja Badan PPSDMP pada masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2017

Kepala Badan,



Ir. Pending Dadih Permana, MEc. Dev

NIP. 19600508 198603 1 026

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
C. Output.....	4
BAB II. ORGANISASI	5
A. Dasar Hukum dan Organisasi	5
B. Keragaan Sumber daya Manusia Organisasi Badan PPSDMP	13
BAB III. RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	15
A. Program.....	15
B. Rencana Anggaran dan Kegiatan	15
C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan	19
BAB IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT	34
A. Permasalahan.....	34
B. Upaya Tindak Lanjut	35
BAB V. PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2016	6
Tabel 2. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama	16
Tabel 3. Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Satker	16
Tabel 4. Rencana Kegiatan dan Target Sasaran BPPSDMP Tahun 2016	17
Tabel 5. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2016	19
Tabel 6. Target dan Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2016	23
Tabel 7. Target dan Realisasi Kegiatan Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian Tahun 2016	26
Tabel 8. Target dan Realisasi Kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian Tahun 2016	29
Tabel 9. Target dan Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2016	30
Tabel 10. Target dan Realisasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknsi Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2016	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan (Data per 31 Desember 2016).....	13
Gambar 2. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Data per 31 Desember 2016).....	14
Gambar 3. BP3K sebagai POSKO Pembangunan Pertanian.....	21
Gambar 4. Pengawasan Penyuluh Pertanian di Sentra Prooduksi.....	22
Gambar 5. Kegiatan Praktek Mahasiswa STPP.....	27
Gambar 6. Kegiatan Praktek Siswa SMK-PP.....	28
Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan Diklat.....	30
Gambar 8. Pelaksanaan Rapim Badan PPSDMP.....	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) tahun 2015-2019 adalah: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Agenda prioritas di bidang pertanian berdasarkan rincian dari 9 Agenda Nawa Cita, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang didukung dengan: (1) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada tahun 2015 – 2019 Kementerian Pertanian telah menetapkan visi Terwujudnya Sistem

Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Dalam rangka mewujudkan visi maka misi Kementerian Pertanian adalah: (1) Mewujudkan kedaulatan pangan; (2) Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan; (3) Mewujudkan kesejahteraan petani; (4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan sumber daya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian akan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM Pertanian, terutama pelaku utama dan pelaku usaha adalah melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian menjadi tugas fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP).

Selaras dengan visi dan misi pembangunan pertanian yang ditetapkan Kementerian Pertanian dan sesuai dengan tugas fungsi, pada periode 2015-2019, Badan PPSDMP telah menetapkan visi organisasi, yaitu: "Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing Berorientasi Bioindustri Berkelanjutan".

Upaya pencapaian visi Badan PPSDMP tersebut, dilakukan melalui misi, yaitu:

1. Memperkuat Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan;
2. Memperkuat Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang Kredibel;
3. Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian yang Berbasis Kompetensi dan Daya Saing;
4. Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel.

Sejalan dengan visi dan misi BPPSDMP, tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian tahun 2015 - 2019 adalah:

1. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani;
2. Menghasilkan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda yang kompeten dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas tenaga fungsional pertanian dan non aparatur pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian;
4. Meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang berdaya saing dan bermartabat;
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi dan manajemen.

Arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian tahun 2015 - 2019 adalah:

1. Optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat BP3K dan WKPP;
2. Peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat;
3. Revitalisasi STPP dan SMKPP serta sertifikasi profesi pertanian;
4. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Badan PPSDMP tahun 2016 adalah Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Kegiatan utama pada tahun 2016 yang mengacu pada Program Peningkatan Penyuluhan,

Pendidikan dan Pelatihan Pertanian sebagai berikut:

1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian;
2. Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian ;
3. Pendidikan Menengah Pertanian;
4. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian;
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian harus diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di Pusat maupun di Daerah. Keberagaman hasil penyelenggaraan kegiatan tersebut, wajib dilaporkan kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Berkaitan dengan pertanggungjawaban kinerja tahun 2016, maka disusun **Laporan Tahunan Badan PPSDMP.**

B. Tujuan

Penyusunan **Laporan Tahunan** bertujuan untuk memberikan informasi penyelenggaraan Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani yang diwujudkan melalui serangkaian kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian selama tahun 2016.

C. Output

Output laporan tahunan berupa dokumen yang berisi informasi mengenai penyelenggaraan program dan kegiatan Badan PPSDMP selama tahun 2016, meliputi: rencana dan realisasi program, kegiatan, anggaran, permasalahan dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan pada tahun mendatang.

BAB II ORGANISASI

A. Dasar Hukum dan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Badan PPSDMP adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Badan PPSDMP mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pelaksanaan tugas fungsi Badan PPSDMP di pusat, didukung oleh 4 unit kerja Eselon II, yaitu:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
2. Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Pusat Pendidikan Pertanian;
4. Sekretariat Badan PPSDMP.

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan
5. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

Struktur organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan terdiri atas: (a) Subbidang Program dan Kerjasama Penyuluhan; dan (b) Subbidang Evaluasi Penyuluhan;
2. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri atas (a) Subbidang Informasi dan Materi Penyuluhan; dan (b) Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani;
3. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan terdiri atas (a) Subbidang Kelembagaan Penyuluhan; dan (b) Subbidang Ketenagaan Penyuluhan; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
5. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian;
6. Penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Struktur organisasi Pusat Pelatihan Pertanian terdiri atas dari 3 bidang dan 6 subbidang, yaitu:

1. Bidang Program dan Kerjasama Pelatihan terdiri atas (a) Subbidang Program Pelatihan; dan (b) Subbidang Kerjasama Pelatihan;
2. Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan Pertanian terdiri atas (a) Subbidang Penyelenggaraan Pelatihan dan (b) Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan;
3. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi terdiri atas (a) Subbidang Standardisasi Kompetensi dan (b) Subbidang Sertifikasi Profesi.

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pendidikan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan

Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
2. Pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia pertanian;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian;
5. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian; dan
6. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian.

Pusat Pendidikan Pertanian terdiri atas 3 bidang dan 6 subbidang, yaitu:

1. Bidang Program dan Kerjasama Pendidikan terdiri atas (a) Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan (b) Subbidang Kerjasama dan Tugas Belajar;
2. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas (a) Subbidang Kurikulum dan Sistem Pembelajaran dan (b) Subbidang Peserta Didik; dan
3. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan terdiri atas (a) Subbidang Kelembagaan Pendidikan dan (b) Subbidang Ketenagaan Pendidikan.

Sekretariat Badan PPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan PPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan PPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
2. Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;

3. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tatalaksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
4. Evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan PPSDMP.

Struktur organisasi Sekretariat Badan PPSDMP terdiri atas:

1. Bagian Perencanaan terdiri atas: (a) Subbagian Program, (b) Subbagian Anggaran, dan (c) Subbagian Kerjasama;
2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: (a) Subbagian Perbendaharaan, (b) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; serta (c) Subbagian Perlengkapan;
3. Bagian Umum terdiri atas: (a) Subbagian Hukum dan Organisasi, (b) Subbagian Kepegawaian, dan (c) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: (a) Subbagian Data dan Evaluasi, (b) Subbagian Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan, dan (c) Subbagian Hubungan Masyarakat.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain didukung oleh 4 unit organisasi Eselon II di Pusat, Badan PPSDMP juga memiliki 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT) (20 Satuan Kerja/Satker) yang berlokasi di daerah. Badan PPSDMP terdiri dari 9 UPT Pendidikan Pertanian (6 UPT setingkat Eselon II, yaitu Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian/STPP, dan 3 UPT setingkat Eselon IV, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan Negeri/SMK-PPN). Selain itu Badan PPSDMP memiliki 10 unit UPT Pelatihan Pertanian (8 UPT setingkat Eselon II terdiri dari 1 Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian/PPMKP, 7 Balai Besar Pelatihan Pertanian/Peternakan/ Kesehatan Hewan atau BBPP/BBPKH, dan 2 UPT setingkat Eselon III, yaitu Balai Pelatihan Pertanian/BPP).

Secara lengkap, masing-masing UPT BPPSDMP adalah sebagai berikut:

UPT Pendidikan Pertanian terdiri dari:

1. STPP Medan Sumatera Utara (1 Satker);
2. STPP Bogor Jawa Barat (1 Satker);
3. STPP Magelang Jawa Tengah (2 Satker);
4. STPP Malang Jawa Timur (1 Satker);
5. STPP Gowa Sulawesi Selatan (1 Satker);
6. STPP Manokwari Papua Barat (1 Satker);
7. SMK-PPN Sembawa Palembang Sumatera Selatan (1 Satker);
8. SMK-PPN Banjarbaru Kalimantan Selatan (1 Satker);
9. SMK-PPN Kupang Nusa Tenggara Timur (1 Satker)

UPT Pelatihan Pertanian terdiri dari:

1. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi-Bogor Jawa Barat (1 Satker);
2. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara-Bogor Jawa Barat (1 Satker);
3. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat (1 Satker);
4. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan-Malang Jawa Timur (1 Satker);
5. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur (1 Satker);
6. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur (1 Satker);
7. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Kalimantan Selatan (1 Satker);
8. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi Selatan (1 Satker);
9. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi (1 Satker);
10. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung (1 Satker).

Dasar hukum eksistensi kelembagaan UPT lingkup Badan PPSDMP masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 550/Kpts/ OT.210/9/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 367/Kpts/OT.210/6/200 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 554/ Kpts/OT.210/9/2002, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 368/Kpts/OT.210/6/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;
2. Keputusan Presiden Nomor: 58/2002 tentang Pendirian STPP Medan, STPP Magelang, STPP Gowa dan STPP Manokwari, yang ditindaklanjuti dengan:
 - a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 549/Kpts/OT.210/9/ 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Medan;
 - b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 551/Kpts/OT.210/9/ 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Manokwari;
 - c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 552/Kpts/OT.210/9 /2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Gowa;
 - d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 553/Kpts/OT.210/9/ 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Magelang
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 100/Permentan/OT.140/ 10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 101/Permentan/OT.140/ 10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 102/Permentan/OT.140/ 10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan

Peternakan Kupang .

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 103/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 104/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 105/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 106/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 107/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 108/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 109/Permentan/OT.140/10/2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 110/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri.

Selain di pusat dan UPT, kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) milik Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan sumber anggaran dari DIPA Badan PPSDMP. Satuan Kerja tersebut adalah Satker Dekonsentrasi di tingkat provinsi dan Satker Tugas Pembantuan di tingkat kabupaten/kota, seperti Dinas Pertanian

Provinsi atau Kabupaten/Kota, Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Provinsi, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh) Kabupaten/Kota.

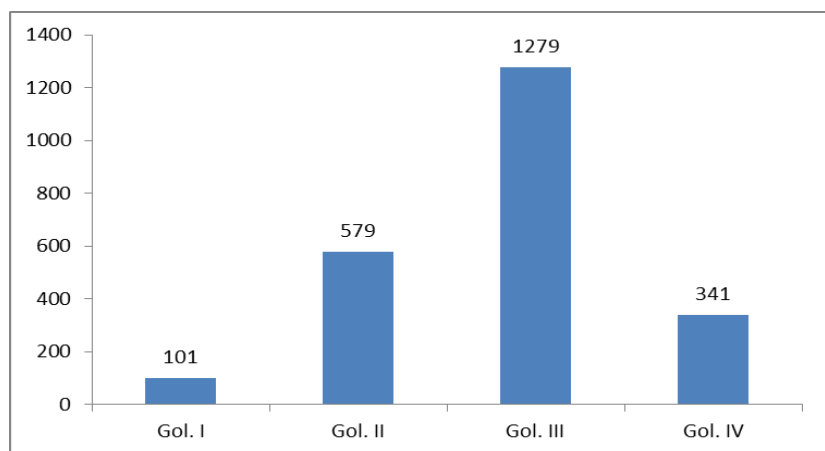
B. Keragaan Sumber daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan PPSDMP didukung oleh 2.232 orang aparat, yang terdiri atas aparat yang bertugas di pusat sebanyak 333 orang dan di daerah (UPT Pusat) sebanyak 1.967 orang.

Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan:

1. Golongan;

Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan terdiri atas: golongan I sebanyak 83 orang; golongan II sebanyak 525 orang; golongan III sebanyak 1.292 orang, dan golongan IV sebanyak 332 orang. Komposisi pegawai berdasarkan golongan ditampilkan pada Gambar 1.

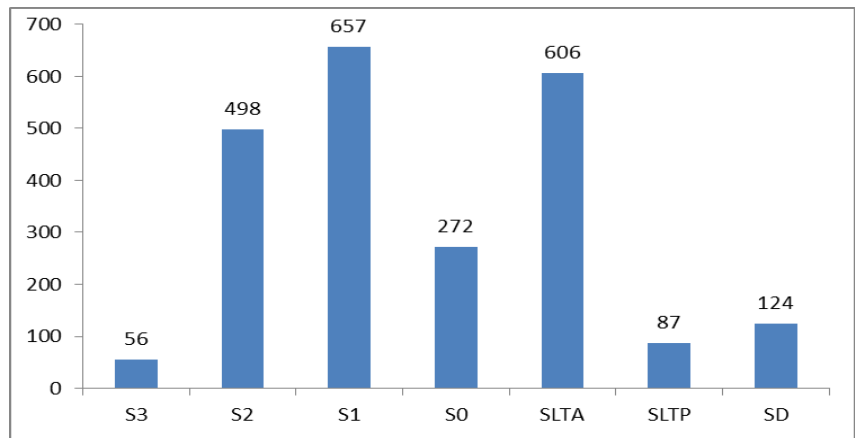


Gambar 1. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan

2. Tingkat pendidikan

Pegawai Badan PPSDMP berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: 58 orang berpendidikan S3 (doktor), 507 orang

berpendidikan S2 (magister), 809 orang berpendidikan S1/D4 (sarjana/setingkat sarjana), 107 orang berpendidikan D1-D3 (diploma), 558 orang berpendidikan SLTA, 92 orang berpendidikan SLTP dan 101 orang berpendidikan SD. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Data per 30 Desember 2016)

BAB III

RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Program

Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Badan PPSDMP tahun 2016 adalah Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dengan fokus pada peningkatan efektivitas penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Oleh karena itu, Badan PPSDMP memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi pendidikan. Dengan fungsi ganda tersebut, tahun 2016 Badan PPSDMP mengembang 2 program, yaitu: (1) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian; dan (2) Program Pendidikan Menengah Pertanian.

B. Rencana Anggaran dan Kegiatan

1. Alokasi Anggaran

Anggaran tahun 2016 dialokasikan dalam rangka mendukung kinerja 4 unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, serta Sekretariat Badan PPSDMP dan Kegiatan READ. Selain itu anggaran ditujukan untuk 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, 34 Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi (Dinas/Badan), serta 8 Satker Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas/Badan).

Pagu Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2016 sebesar **Rp1.676.230.420,-** (DIPA Induk Badan PPSDMP Nomor SP DIPA-018.10-0/2016 tanggal 7 Desember 2015). Anggaran tersebut mengalami *self blocking* sebesar Rp45.000.000.000,- sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar

Rp1.378.601.567.000,-. Adapun komposisi anggaran berdasarkan kegiatan utama ditampilkan pada Tabel 1; jenis belanja pada Tabel 2; dan kewenangan satker pada Tabel 3.

Tabel 1.
Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama
Tahun 2016

NO	KEGIATAN	PAGU (RP)	
		AWAL	SETELAH BLOCKING
1.	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	759.781.814.000	748.066.346.000
2.	Revitalisasi Pendidikan Pertanian	226.805.994.000	217.912.932.000
3.	Pendidikan Menengah Pertanian	60.536.031.000	59.585.088.000
4.	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	299.305.815.000	288.334.246.000
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	77.171.913.000	64.702.955.000
Total		1.423.601.567.000	1.378.601.567.000

Tabel 2.
Komposisi Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2016

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	
		AWAL	SETELAH BLOCKING
1.	Belanja Pegawai	150.403.454.000	147.711.127.000
2.	Belanja Barang	1.221.613.731.000	1.190.479.112.000
3.	Belanja Modal	51.584.382.000	40.411.328.000
Total		1.423.601.567.000	1.378.601.567.000

Tabel 3.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Satker
Tahun 2016

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	
		AWAL	SETELAH BLOCKING
1.	Pusat	183.989.482.000	166.783.277.000
2.	UPT	464.701.349.000	447.959.022.000
3.	Dekonsentrasi	764.588.411.000	753.536.943.000
4.	Tugas Pembantuan (READ)	10.322.325.000	10.322.325.000
Total		1.423.601.567.000	1.378.601.567.000

2. Rencana Kegiatan

Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Badan PPSDMP, yaitu (a) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; (b) Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; (c) Pendidikan Menengah Pertanian; (d) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; (e) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP mempunyai target sasaran pada tahun 2016. Rencana kegiatan dan target sasaran kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2016 secara rinci disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Rencana Kegiatan dan Target Sasaran Badan PPSDMP
Tahun 2016

NO	RENCANA KEGIATAN	TARGET	SASARAN
A.	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian		
1.	Fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian.	5.895 unit	34 unit Bakorluh; 514 unit Bapeluh; 2.000 unit BP3K.
2.	Fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan petani	21.220 unit	
a	Kelembagaan petani dan ekonomi petani yang difasilitasi dan dikembangkan		1.220 unit
b	Pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra produksi pangan		20.000 WKPP.
3.	Fasilitasi ketenagaan penyuluhan pertanian	52.013 orang	24.996 Penyuluh PNS 19.017 THL-TB PP 8.000 Penyuluh Swadaya
4.	Penyusunan dan perbanyak materi penyuluhan pertanian.	649 dokument	Materi informasi pusat berupa extension, media televisi, media radio, media cetak, dan materi informasi tercetak
B.	Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi		
1.	Pendidikan formal pasca sarjana bagi aparatur pertanian.	230 orang	PNS lingkup Pertanian yang telah memenuhi persyaratan tugas belajar dan mengikuti tugas belajar di Perguruan Tinggi Negeri.

NO	RENCANA KEGIATAN	TARGET	SASARAN
2.	Fasilitasi peserta didik di STPP	2.776 orang	Mahasiswa STPP.
3.	Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pendidikan pertanian.	17 unit	Fasilitasi bagi kelembagaan STPP kelembagaan sertifikasi profesi
4.	Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pendidikan pertanian.	163 orang	Dosen dan tenaga kependidikan tinggi pertanian.
5.	Standardisasi profesi bidang pertanian.	5 dokumen	Dokumen SKNNI.
6.	Sertifikasi profesi bagi SDM Pertanian.	2.700 orang	SDM pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi.
C. Pendidikan Menengah Pertanian			
1.	Pendidikan menengah bagi generasi muda pertanian.	15.640	Fasilitasi bagi siswa SMK-PP di SMK-PP UPT BPPSDMP dan eks-UPT BPPSDMP.
2.	Fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan SMK-PP	75 unit	SMK-PP UPT BPPSDMP dan eks-UPT BPPSDMP.
3.	Fasilitasi dan pengembangan Ketenagaan SMK-PP	166 orang	Guru dan tenaga pendidikan menengah di SMK-PP
D. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian			
1.	Peningkatan kompetensi aparatur pertanian melalui pelatihan	15.889 orang	Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian, pelatihan manajemen dan kepemimpinan dan pelatihan fungsional pertanian di UPT Pelatihan Pusat dan Daerah.
2.	Peningkatan kompetensi non aparatur pertanian melalui pelatihan	7.572 orang	Pelaku utama dan pelaku usaha yang mengikuti pelatihan teknis pertanian dan pelatihan manajemen kewirausahaan pertanian.
3.	Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian	28 unit	UPT Pelatihan Pusat dan UPT Pelatihan Daerah.
4.	Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pelatihan	1.666 orang	Widyaiwara, tenaga teknis kediklatan, dan

NO	RENCANA KEGIATAN	TARGET	SASARAN
	pertanian		instruktur P4S.
5.	Peningkatan kapasitas desa melalui program READ	30 desa	Desa pelaksana kegiatan READ
	Fasilitasi dan klasifikasi kelembagaan petani	685 unit	Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) yang difasilitasi dan diklasifikasi
E.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya		
1.	Penyediaan dokumen Perencanaan, Perundang-undangan, Kepegawaian dan Rumah Tangga, Keuangan dan Perlengkapan serta Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan	70 dokumen	dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya kegiatan kesekretariatan BPPSDMP

C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

1. Realisasi Anggaran

Sampai dengan 31 Desember 2016, realisasi penyerapan anggaran setelah penghematan yaitu sebesar 97.12%, dengan rincian realisasi per kegiatan utama ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5.
Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2016

NO	KEGIATAN	PAGU SETELAH <i>BLOCKING</i>	REALISASI	%
1.	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	748.066.345.000	731.768.384.000	96.82
2.	Revitalisasi Pendidikan Pertanian	217.912.932.000	208.892.118.214	95.86
3.	Pendidikan Menengah Pertanian	59.585.088.000	57.710.862.377	96.85
4.	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	288.334.246.000	278.063.825.365	96.44
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	64.702.955.000	62.447.275.452	96.51
	Total	1.411.132.609.000	1.338.882.465.481	97.12

2. Realisasi Kegiatan

Realisasi kegiatan merupakan capaian fisik dari masing-masing kegiatan kinerja kegiatan/output utama Badan PPSDMP selama tahun 2016 dengan cara membandingkan antara realisasi dengan rencana atau target.

a. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Terdapat penurunan target kegiatan utama Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, dari awal 5.895 orang menjadi 2.548 orang sasaran. Penurunan target ini disebabkan adanya penghematan anggaran. Capaian Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian didukung oleh kegiatan-kegiatan yang antara lain:

1) Fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian

Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian (Bakorluh, Bapeluh dan BP3K) didukung oleh beberapa tingkatan kelembagaan penyuluhan sebagai berikut:

- a) Kelembagaan Penyuluhan Provinsi, dengan kegiatan: Temu Koordinasi Penyuluh Provinsi; Administrasi Kegiatan; Pengembangan Database Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian; Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Provinsi; Penyusunan dan Penyebaran Materi Provinsi; dan Langganan Tabloid dan Majalah Pertanian;
- b) Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/ Kota dengan kegiatan: Temu Teknis Tingkat Kabupaten/Kota; Pertemuan Evaluasi Tingkat Kabupaten/Kota; Pengembangan Database Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan

Pertanian; Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan; Administrasi Kegiatan; Penyusunan dan Penyebaran Materi Penyuluhan Pertanian; dan Langganan Tabloid Pertanian;

- c) Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan, didukung dengan kegiatan: Temu Teknis Penyuluhan Tingkat Kecamatan; Penyusunan Program Kecamatan; Rembug Tani; Kursus Tani; *Farmer Field Days*; Administrasi BP3K; Pengelolaan Database dan *Cyber Extension*, serta Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi Spesifik Lokasi.

2) **Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani**

Capaian fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani didukung oleh kegiatan: (a) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani; serta (b) Pemberdayaan Petani di Sentra Produksi Pangan.



Gambar 3. BP3K sebagai POSKO Pembangunan Pertanian

3) **Fasilitasi ketenagaan penyuluhan pertanian**

Fasilitasi bagi penyuluh pertanian didukung dengan kegiatan: (a) Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS; (b) Honorarium dan Biaya Operasional THL-TB

Penyuluh Pertanian selama 10 bulan; dan (c) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya.

4) Penyusunan dan perbanyakan materi penyuluhan

Fasilitasi bagi materi penyuluh dalam bentuk kegiatan:

- (a) Langganan Tabloid Pertanian bagi Penyuluh Pertanian (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan);
- (b) Langganan Majalah Pertanian bagi kelembagaan penyuluhan provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
- (c) Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- (e) Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi Spesifik Lokasi BP3K.



Gambar 4. Pengawalan Penyuluhan Pertanian di Sentra Produksi

Perbandingan realisasi kegiatan dengan target sasaran kegiatan utama Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Target dan Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem
Penyuluhan Pertanian Tahun 2016

No	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian (unit)	2.548 unit	2.548 unit	100
	a. Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat provinsi/ Bakorluh	34 unit	34 unit	100
	b. Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota/ Bapeluh	514 unit	514 unit	100
	c. Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan/ BP3K	2.000 unit	514 unit	100
2.	Fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan petani	21.220 unit	21.220 unit	100
	a. Kelembagaan petani dan ekonomi petani yang difasilitasi dan dikembangkan	1.220 unit	1.220 unit	100
	b. Pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra produksi pangan (WKPP)	20.000 WKPP	20.000 WKPP	100
3.	Fasilitasi ketenagaan penyuluhan pertanian	52.013 orang	52.013 orang	100
	a. BOP Penyuluh Pertanian PNS	24.996 orang	24.996 orang	
	b. Honor dan BOP THL-TB PP	19.017 orang	19.017 orang	
	c. Pemberdayaan Penyuluh Swadaya	8.000 orang	8.000 orang	
4.	Penyusunan dan perbanyak materi penyuluhan pertanian.	649 judul	649 judul	100

b. Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian

Capaian kegiatan Revitalisasi Pendidikan Pertanian didukung oleh kegiatan:

1) Fasilitas pendidikan pascasarjana bagi aparaturn pertanian

Untuk mendukung fasilitas pendidikan formal pascasarjana bagi aparaturn pertanian meliputi kegiatan: (a) penyusunan RIPTB; (b) seleksi calon peserta tugas belajar; (c) fasilitas pendidikan S2 dan S3; (d) koordinasi dan evaluasi tugas belajar dengan 10 Perguruan Tinggi; (e) pembekalan, pengawalan, dan pendampingan tugas belajar dalam negeri; dan (f) aparaturn dan non aparaturn pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi pertanian.

2) Fasilitas aparaturn pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi

Kegiatan untuk mendukung fasilitas aparaturn pertanian mengikuti pendidikan tinggi meliputi: (a) supervisi dan pengawalan program pendampingan mahasiswa; (b) dukungan dalam rangka pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta UPSUS; (c) koordinasi teknis pendidikan tinggi pertanian; (d) pengawalan penyelenggaraan pendidikan; (e) pembinaan dan pengembangan kelembagaan pendidikan pertanian; (f) pengelolaan pangkalan data DIKTI; (g) fasilitas penjamin mutu pendidikan; (h) manajemen pengelolaan lahan praktik; (i) pengembangan E-learning di STPP; dan (j) supervisi pembinaan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) oleh STPP.

3) Fasilitas dan pengembangan kelembagaan

Fasilitas dan pengembangan kelembagaan pendidikan pertanian didukung oleh kegiatan: (a) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan pendidikan pertanian; (b) Pengelolaan pangkalan Dikti; (c) Fasilitas penjamin

mutu; (d) Manajemen pengelolaan lahan praktik; dan (e) Pembinaan dan pengembangan unit produksi.

4) Fasilitas dan pengembangan ketenagaan pertanian

Kegiatan pengembangan ketenagaan pertanian meliputi: (a) Peningkatan profesionalisme staff; (b) pendidikan profesi guru pertanian; (c) fasilitasi bimtek program keterampilan dasar teknis instruksional (Pekerti) dan *applied approach* bagi dosen; (d) fasilitasi tenaga pendidik berprestasi tahun 2016; (e) penilaian dan penetapan angka kredit dosen; (f) workshop pengembangan karya ilmiah tenaga pendidik; (g) magang teknis bagi dosen; (h) bimtek pendidikan guru pertanian program induksi; (i) bimtek fungsional pranata laboratorium pendidikan (PLP); (j) workshop pengembangan metode pembelajaran di STPP; (k) pengembangan karya inovatif mahasiswa STPP; dan (l) temu teknologi mahasiswa STPP.

5) Dokumen program dan kerjasama bidang pendidikan pertanian

Dokumen program dan kerjasama bidang pendidikan pertanian dihasilkan dari kegiatan: (a) koordinasi dan sinkronisasi SBM Pendidikan tahun 2017; (b) koordinasi dan sinkronisasi program, kegiatan dan anggaran tahun 2017; (c) penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan; (d) penyusunan LAKIP; (e) administrasi pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi; (f) penyusunan jurnal teknologi; (g) koordinasi pimpinan; (h) pembinaan dan pengawalan program; (i) fasilitasi pertukaran pendidikan dan tenaga kependidikan di luar negeri; (j) workshop penumbuhan wirausaha muda pertanian; (k) penetapan calon wirausaha muda

pertanian; (l) pendampingan wirausaha muda; (m) pertemuan koordinasi koordinasi wirausaha muda pertanian; (n) fasilitasi penyusunan pedoman pembinaan peserta didik; (o) fasilitasi penyusunan pedoman penyelenggaraan pendidikan; (p) kajian SDM pertanian; (q) koordinasi dan dinkronisasi retooling (pemagangan) di perkebunan; (r) monev retooling di perkebunan kelapa sawit; (s) pertemuan dosen STPP bidang kewirausahaan; (t) evaluasi program pelaksanaan pendidikan pertanian; (u) fasilitasi penerimaan mahasiswa baru; (v) kerjasama dengan instansi terkait; (w) pengendalian harga komoditas pertanian; dan (x) temu petani, penyuluhan, mahasiswa dan siswa pertanian.

Perbandingan realisasi kegiatan dengan target sasaran Revitalisasi Pendidikan Pertanian secara ringkas ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7.
Target dan Realisasi Kegiatan Revitalisasi Pendidikan
Pertanian Tahun 2016

No.	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Fasilitasi pendidikan pascasarjana bagi aparatur pertanian (orang)	280	280	100,00
2.	Fasilitasi aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi (orang)	3.350	3.350	100,00
3.	Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pendidikan pertanian (unit)	6	6	100,00
4.	Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pendidikan pertanian (orang)	499	499	100,00
5.	Program dan Kerjasama Pendidikan Pertanian	25	25	100,00



Gambar 5. Kegiatan Praktek Mahasiswa STPP

c. **Pendidikan Menengah Pertanian**

Capaian kegiatan utama Pendidikan Menengah Pertanian didukung oleh kegiatan:

1) Fasilitasi generasi muda yang mengikuti pendidikan menengah pertanian

Fasilitasi generasi muda yang mengikuti pendidikan menengah pertanian meliputi kegiatan: (a) Bantuan alat praktek bagi siswa; (b) program pertukaran siswa SMK-PP ke luar negeri; (c) pengembangan karya inovatif siswa SMK-PP; (d) peningkatan kompetensi generasi muda; (e) program wirausaha muda pertanian; (f) koordinasi teknis pendidikan menengah pertanian; (g) pembinaan dan pengembangan unit produksi di SMK-PP; (h) pembinaan penyelenggaraan pendidikan, pengawalan ujian dan wisuda SMK-PP; (i) penyusunan pedoman penyelenggaraan pendidikan di SMK-PP; (j) workshop penyusunan bahan ajar SMK-PP; (k) pembinaan generasi muda melalui Saka Tarunabumi; dan (l) persiapan Pertikabumi tingkat nasional tahun 2017.

2) Fasilitas pengembangan ketenagaan pendidikan menengah

Fasilitas pengembangan ketenagaan pendidikan menengah dicapai dengan kegiatan: (a) magang bagi guru SMK-PP bidang produktif; (b) workshop manajemen kepala sekolah; (c) penilaian dan penetapan angka kredit tenaga pendidik; (d) pengembangan karya ilmiah bagi tenaga pendidik; (e) pengembangan kerjasama dalam negeri; dan (f) pengembangan kerjasama luar negeri.



Gambar 6. Kegiatan Praktek Siswa SMK-PP

Realisasi kegiatan dibandingkan dengan target sasaran kegiatan utama Pendidikan Menengah Tahun 2016, ditampilkan pada Tabel 8.

Tabel 8.
Target dan Realisasi Kegiatan
Pendidikan Menengah Pertanian Tahun 2016

No.	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Fasilitasi generasi muda yang mengikuti pendidikan di SMK-PP (orang)	15.815	15.815	100,00
2.	Fasilitasi dan pengembangan Ketenagan SMK-PP (orang)	471	471	100,00
3.	Fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan SMK-PP (unit)	84	87	103,57

d. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Capaian kegiatan utama Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian (orang)

Fasilitasi aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui diklat meliputi kegiatan: (a) Diklat dalam Jabatan (Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, Diklat Administrasi dan Manajemen, Diklat Manajemen bagi Pimpinan BP3K, Diklat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian); dan (b) Diklat Teknis Pertanian mendukung UPSUS Pajale.

2) Peningkatan kompetensi non aparatur pertanian melalui pelatihan

Fasilitasi non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui diklat meliputi kegiatan: (a) Diklat Kewirausahaan; (b) Diklat Teknis Pertanian (Teknis Tanaman Pangan; Teknis Perkebunan; Teknis Hortikultura; Teknis Mendukung Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian); dan (c) *Agri Training Camp* (ATC).



Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan Diklat

3) Fasilitas prasarana dan sarana pembelajaran kelembagaan pelatihan

Fasilitas prasarana dan sarana pembelajaran ditujukan pada UPT pelatihan pusat, dan ditujukan untuk pengembangan laboratorium, Pusat Inkubator Agribisnis (PIA), dan rehabilitasi gudang.

4) Fasilitas dan klasifikasi kelembagaan pelatihan petani

Fasilitas kelembagaan pelatihan petani (P4S) didukung oleh kegiatan: (a) Penghargaan P4S Berprestasi; (b) Pemberdayaan SDM melalui Diklat bagi Petani di P4S.

5) Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) standar Internasional dan standar.

Sertifikasi kompetensi dimaksudkan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kompetensi, serta jaminan dan pemeliharaan untuk kompetensi, untuk

mewujudkan sistem sertifikasi kompetensi yang berkualitas.

6) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pertanian diwilayah perbatasan melalui replikasi READ

Program READ bertujuan untuk memperbaiki mata pencarian kaum miskin perdesaan secara berkelanjutan, adapun tujuan yang hendak di capai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam di 30 (tiga puluh) desa sasaran di provinsi Kalimantan Barat dan provinsi NTT.

7) Sertifikasi profesi Tenaga Kerja Bidang Pertanian

Sertifikasi kopetensi merupakan proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian kompetensi, sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)/Standar Internasional dan/standar khusus. Sertifikasi kompetensi dimaksudkan untuk memberikan pengakuan dan pengesahan untuk mewujudkan sistem sertifikasi kopetensi yang berkualitas, penyelenggaraan sertifikasi mengacu pada pedoman penyelenggaraan sertifikasi kompetensi SDM

Perbandingan realisasi dengan target sasaran kegiatan utama Pemantapan Sistem Pelatihan Tahun 2016, disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9.
Target dan Realisasi Kegiatan
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2016

NO.	RENCANA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Peningkatan kompetensi aparatur pertanian melalui pelatihan (orang)	16.285	15.759	96,77
2.	Peningkatan kompetensi non aparatur pertanian melalui pelatihan (orang)	7.573	7.790	102,87
3.	Fasilitasi prasarana dan sarana pembelajaran kelembagaan pelatihan (unit)	10	10	100,00
4.	Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian (unit)	713	745	104,49
5.	Pengembangan SKKNI	3	3	100,00
6.	Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pelatihan pertanian (orang)	1.421	1.608	113,16
7.	Peningkatan kapasitas desa melalui program READ (desa)	30	30	100,00
8.	Standardisasi profesi bidang pertanian (dok)	1	1	100,00
9.	Sertifikasi profesi bagi SDM Pertanian (orang)	1.330	1.237	105,30

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Capaian kegiatan ini didukung oleh penyediaan dokumen Perencanaan, Perundang-undangan, Kepegawaian dan Rumah Tangga, Keuangan dan Perlengkapan serta Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan yang ditargetkan 70 dokumen dan terealisasi 100%.

Secara rinci realisasi pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP selama Tahun 2016 tersaji pada Tabel 10.

Tabel 10.
Target dan Realisasi Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP Tahun 2016

NO.	RENCANA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (dokumen)	49	49	100,00
2.	Peningkatan dan Pengembangan Administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik Negara satuan kerja lingkup Badan PPSDMP (dokumen)	21	21	100,00
3.	Peningkatan perundang-undangan, kepegawaian dan rumah tangga	29	29	100,00
4.	Pengembangan sistem pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan kehumas	45	45	100,00
	Total (dokumen)	144	144	100,00



Gambar 8. Pelaksanaan Rapat Pimpinan Badan PPSDMP

BAB IV.

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2016 adalah pada masing-masing kegiatan utama secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

- a. Minimnya koordinasi dengan dinas terkait, terutama dalam penetapan lokasi kegiatan sehingga kegiatan pendampingan dan pengawalan oleh penyuluh menjadi terhambat;
- b. Realisasi kegiatan dekonsentrasi baru dapat terlaksana pada awal Maret dikarenakan terjadi revisi anggaran serta menunggu Rencana Kinerja tingkat pusat untuk dilaksanakan;
- c. Adanya kegiatan tambahan APBN-P dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang membuat terjadinya perubahan alokasi dan keterlambatan sebagian pelaksanaan kegiatan;
- d. Banyaknya kegiatan baik yang didanai dari APBN, APBN-P, APBD I, dan APBD II yang membutuhkan SDM cukup banyak, sementara SDM yang tersedia kurang mencukupi baik tenaga teknis maupun administrasi;
- e. Kegiatan pengawalan dan pendampingan di lokasi sentra pangan terkendala faktor iklim dan serangan hama;
- f. Jumlah penyuluh pertanian PNS dan THL-TB PP setiap tahun berkurang;
- g. *Updating* data-data ketenagaan (Penyuluh, THL-TB-PP, Swadaya), kelembagaan penyuluhan (Bakorluh, Bapelluh dan BPP Kecamatan) dan kelembagaan petani (Poktan dan Gapoktan) belum maksimal sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal.

2. Pemantapan Sistem Pendidikan Tinggi Pertanian

- a. Proses transformasi kelembagaan STPP menjadi Politeknik belum selesai di tahun 2016;
- b. Belum terbentuknya sekolah rujukan bidang pertanian yang akan dijadikan acuan bentuk pendidikan pertanian di Indonesia;
- c. Sebaran jumlah kualifikasi guru dan dosen belum merata;
- d. Kapasitas guru SMK-PP dan dosen STPP belum memadai;
- e. Belum optimalnya kerjasama/koordinasi lintas sektor bidang pendidikan pertanian;
- f. Minimnya prasarana dan sarana UPT Pendidikan (SMK-PP dan STPP).

3. Pendidikan Menengah Pertanian

- a. Turunnya minat lulusan SLTP untuk mengikuti pendidikan menengah kejuruan pertanian (SMK-PP).
- b. Minimnya sarana dan prasarana SMK-PP
- c. Terbatasnya tenaga pendidik yang sesuai dengan kompetensinya di SMK-PP;
- d. Terpisahnya lokasi kampus dengan lahan praktik di SMK-PP.

4. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

- a. Belum meratanya pemahaman pelaksana diklat, kelembagaan penyuluhan baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota dalam pelaksanaan penyiapan SDM GPPT melalui pelaksanaan diklat tematik
- b. Koordinasi, pembinaan dan pendampingan merupakan salah satu kegiatan yang terkena dampak dari penghematan (volume kegiatannya dikurangi), sehingga mengakibatkan kurangnya koordinasi antar instansi terkait;

- c. Belum meratanya kualitas dan kompetensi tenaga kediklatan (widyaiswara, Penyuluh Pertanian PNS dan Swadaya, dosen dan praktisi);
- d. Pelaksanaan IKL dan AKL belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peserta latihan;
- e. Penetapan Kurikulum, metode, dan pola diklat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan;
- f. Seleksi peserta kurang ketat dan cermat, kualifikasi, dan sasaran kurang sesuai yang ditentukan/diharapkan.

5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP

- a. Pelaksanaan Kegiatan di daerah terhambat dikarenakan adanya Kebijakan Menteri Pertanian melalui Surat Keputusan Nomor: 119/RC.110/M/9/216 tentang Usulan Revisi DIPA APBN-P Penghematan Anggaran Kementerian Pertanian tentang Self Blocking TA. 2016;
- b. Pelaksanaan Kegiatan belum sesuai dengan SOP yang dibuat;
- b. Belum efektifnya koordinasi perencanaan antara satker pusat, UPT, dan dekonsentrasi;
- c. Hasil evaluasi tahun sebelumnya belum dipakai untuk perbaikan perencanaan sehingga permasalahan tahun lalu terulang kembali;
- a. Belum disusunnya Analisis resiko pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan;
- d. Rencana Operasional Pelaksanaan Alokasi Kegiatan (ROPAK) belum terkawal dengan baik sehingga pelaksanaan kegiatan kurang efektif;
- e. Masih banyaknya dilakukan Revisi POK/DIPA;
- f. Belum tertibnya penomoran barang milik Negara yang merupakan bantuan dari pusat kepada satker TP;

- g. Terlambatnya menindaklanjuti penanganan Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan;
- h. Belum optimal peranan Satlak SPI dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.

B. Upaya Tindak Lanjut

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan kendala tersebut akan ditempuh upaya sebagai berikut:

1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga program/kegiatan menjadi sejalan / sinkron;
- b. Pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang agar disesuaikan dengan jadwal kalender tanam;
- c. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan tidak terjadi revisi anggaran serta renja tingkat pusat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan pada awal tahun atau di bulan Januari dan sesuai target/waktu yang telah ditetapkan;
- d. Pada tahun-tahun mendatang adanya kegiatan APBNP tidak akan mengganggu atau merubah kegiatan APBN yang sedang berjalan;
- e. Diharapkan adanya tambahan personil baik PNS ataupun THL di daerah agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
- f. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan para pelaksana kegiatan mengikuti ROK atau jadwal palang yang telah disepakati.
- g. Melakukan koordinasi antara Dinas Teknis dengan Bakorluh dalam penentuan CP/CL ;
- h. Pengangkatan THL-TB PP menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memberdayakan penyuluh pertanian

swadaya dalam pengawalan dan pendampingan di lokasi sentra produksi pangan;

- i. Melakukan optimalisasi data system manajemen penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN) yang meliputi data kelembagaan petani (Poktan dan Gapoktan), kelembagaan penyuluhan (Bakorluh, Bapelluh dan BPP Kecamatan) dan ketenagaan penyuluhan (PNS, THL-TBPP, dan swadaya).

2. Pemantapan Sistem Pendidikan Tinggi Pertanian

- a. Proses transformasi kelembagaan pendidikan STPP menjadi Politeknik dilanjutkan pada tahun 2017;
- b. Revitalisasi pendidikan menengah pertaanian dengan llebih memperhatikan kebutuhan pasar (demnd driven) di tahun 2015;
- c. Penataan guru dan dosen sesuai dengan kualifikasinya;
- d. Adanya peningkatan profesionalisme guru dan dosen melalui pendidikan, pelatihan, magang, studi banding, dan pertemuan lainnya;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor bidang pendidikan pertanian;
- f. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di UPT.

3. Pendidikan Menengah Pertanian

- a. Meningkatkan sosialisasi keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian kepada masyarakat serta merangkul SMK Pertanian yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana, seperti kelas, laboratorium dan sarana lainnya, yang mendukung penambahan kompetensi keahlian;
- c. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dalam rangka pemenuhan tenaga pendidik yang kompeten serta

- mengusulkan tambahan tenaga pendidik yang kompeten
- d. Perlunya fasilitasi dalam mengamankan aset SMK-PP.

4. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

- a. Kualitas tenaga kediklatan (Widyaiswara sebagai fasilitator, Penyuluh Pertanian PNS dan Swadaya, dosen serta praktisi) masih perlu ditingkatkan secara berjenjang melalui diklat kompetensi dan sertifikasi, serta kemampuan penguasaan Bahasa Inggris, sehingga kemampuan mentransfer pengetahuan kepada peserta diklat lebih variatif, inovatif, dan efektif, serta mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2016;
- b. Pelaksanaan IKL dan AKL perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga diklat yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan peserta Diklat dan efektif;
- c. Kurikulum diklat perlu disesuaikan dan dipaduserasikan dengan jenis Diklat sesuai IKL dan AKL dalam mendukung peningkatan produksi 7 komoditas strategis, agar *output* dan *outcome* dapat tercapai secara efektif dan dapat diterapkan.

5. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya.

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang antisipasi dalam menghadapi adanya kebijakan penghematan;
- b. Melakukan upaya pengendalian Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masih terdapat kelemahan dalam pencatatan dan penatausahaan PNBP pada satker Badan PPSDMP;
- c. Renstra, RKT dan PK perlu ditelaah kembali dan disinkronkan dalam LAKIP;
- d. Memperkaya analisis hasil evaluasi pelaksanaan

kegiatan sehingga dapat memberikan penjelasan/alasan strategis faktor keberhasilan atau kegagalan dan memberikan rekomendasi atau usulan perbaikan;

- e. Melakukan pemantauan PK secara periodik dan mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi antara bagian yang menangani perencanaan, bagian yang menangani evaluasi dan pelaporan
- f. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Lingkup BPPSDMP dan UPT, maka direkomendasikan agar 1) Meningkatkan kinerja Tim Satlak PI; 2) Perlu adanya "*knowledge sharing*" tentang SPI dengan melibatkan narasumber dari luar seperti Tim Pembina SPI (Itjen, BPK, BPKP); 3) Perlu sosialisasi dan forum-forum dengan melibatkan seluruh pegawai; 4) Memasukkan kinerja satlak PI dalam kontrak kinerja pimpinan/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- g. Dalam rangka mengoptimalkan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Lembaga Auditor (Itjen, BPK, BPKP) direkomendasikan agar: (1) penelusuran kerugian negara pada satker baru melalui forum pertemuan dengan pendampingan Itjen Kementan dan BPKP Pusat; (2) mengirimkan surat pemberitahuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk memfasilitasi penyelesaian temuan Kerugian Negara pada Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang sulit ditindaklanjuti; (3) pembinaan melalui kegiatan kunjungan pada satker yang terdapat temuan yang belum tuntas; (4) membuat surat edaran Kepala Badan kepada pimpinan satker tentang temuan – temuan baik secara administrasi maupun teknis untuk dapat segera

menindaklanjuti hingga tuntas; (5) sosialisasi ke satker tentang peraturan jangka waktu penyelesaian hasil pemeriksaan; (6) memberikan saran ke satker lingkup Badan PPSDMP tentang penetapan sanksi administrasi berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 kepada penyebab kerugian negara atau instansi dan pimpinan satkernya yang tidak mau membantu/berupaya untuk penagihan atau penyelesaian kerugian negara tersebut.

- h. Dilakukan pelaksanaan Pengendalian Intern lingkup Badan PPSDMP secara periodik, dimulai dengan penetapan dan pengukuhan Satlak, sosialisasi maturitas, dan gratifikasi, supervisi dan pembinaan;

BAB V

PENUTUP

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian memiliki fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Tahun 2016, fungsi tersebut diwujudkan melalui Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian serta Program Pendidikan Menengah Pertanian. Kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi: (1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; (2) Revitalisasi Pendidikan Pertanian; (3) Pendidikan Menengah Pertanian; (4) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; serta (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Realisasi serapan anggaran program dan kegiatan Badan PPSDMP pada tahun 2016, secara menyeluruh mencapai 97,12%, yaitu sebesar Rp 1.338.882.465.481,- dari total alokasi pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp 1.378.601.567.000,-

Pencapaian realisasi fisik kegiatan BPPSDMP pada tahun 2016 adalah sebesar pada kisaran 96,77% - 113,16% Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut Badan PPSDMP didukung oleh satker pusat; 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat; 34 Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi (Dinas/Badan), serta 8 Satker Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan lain juga menjadi salah satu faktor kunci pencapaian kegiatan pada tahun 2016.

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan utama mempunyai permasalahan/kendala dan telah direkomendasikan tindak lanjut yang dapat dilakukan sebagai solusi permasalahan tersebut. Hal hal yang disampaikan dalam Laporan Tahunan ini menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan PPSDMP

Lampiran 2. Data Kepegawaian Badan PPSDMP

Lampiran 3. Data Jabatan Fungsional



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM

TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233

SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pending Dadih Permana
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2016

Pihak Kedua,

A. Amran Sulaiman

Pihak Pertama,

Pending Dadih Permana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

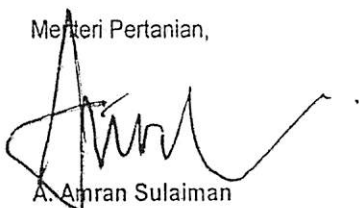
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani	1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	21.220 Unit
		2. Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya	2.000 Unit
2.	Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur	1. Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja	5.100 Orang
		- Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja	600 Orang
		- Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja	4.500 Orang
3.	Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian	1. Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	25.397 Orang
		- Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	16.656 Orang
		- Jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	8.741 Orang

Kegiatan	Anggaran
1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Rp. 298.787.992.000
2. Revitalisasi Pendidikan Pertanian	Rp. 226.731.070.000
3. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Rp. 759.781.814.000
4. Pendidikan Menengah Pertanian	Rp. 60.536.031.000
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp. 77.463.513.000

Jakarta, Oktober 2016

Menteri Pertanian,



A. Amran Sulaiman

Kepala Badan,



Pending Dadih Permana

PEMANTAUAN PERKEMBANGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BPDPMP TAHUN 2016													
INDIKATOR : PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA PETANI													
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Pagu	Anggaran (Rp)				
1	Meningkatnya kemandirian petani	1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya (UNIT) :	21,220	83	5,468	16,142	20,978	82,982,150,000	84,810,000	15,743,039,500	58,579,455,175	77,305,241,800	
			940	-	94	554	764						
			(KELOMPOK)										
			a. Pengembangan kelembagaan Ekonomi Petani	280	-	8	163	214					
			b. Pengembangan kelembagaan Ekonomi Petani	20,000	83	5,366	15,425	20,000					
			c. Pengembangan dan Pendampingan Lokasi Sentra Petani Desa dan Kunjungan Penyuluh (WKPP)										
			2. Jumlah BP3K yang meningkatkan kapasitasnya (UNIT) :	2,000	-	1,233	1,804	2,000					
			a. Temu Teknis Penyuluhan Tk. Kecamatan (kec)	2,000	-	1,012	1,613	2,000					
			b. Rembug Tani (kec)	2,000	-	803	1,448	2,000					
			c. Kursus Tani (kec)	2,000	-	366	997	2,000					
2	Meningkatnya kapasitas aparat pertanian dan non aparat	1. Jumlah SOM lulusan pendidikan tingkat dan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja <td>5,100</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>345</td> <td>5,100</td> <td>149,925,659,000</td> <td>11,995,961,050</td> <td>51,016,173,378</td> <td>106,433,897,205</td> <td>140,706,487,197</td>	5,100	-	-	345	5,100	149,925,659,000	11,995,961,050	51,016,173,378	106,433,897,205	140,706,487,197	
			600	-	-	600							
			a. Jumlah SOM lulusan pendidikan tingkat yang memenuhi standar kompetensi kerja	4,500	-	-	4,500						
			b. Jumlah SOM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja	25,513	18,418	24,239	25,477	101,996,520,000	31,332,934,358	64,432,656,217	85,762,673,117	98,218,240,595	
			1. Jumlah aparat dan non aparat pertanian yang meningkatkan kompetensi kerjanya	25,513	8,599	18,418	24,239	25,477	101,996,520,000	31,332,934,358	64,432,656,217	85,762,673,117	98,218,240,595
			ORANG :										
			a. Jumlah aparat pertanian yang meningkatkan kompetensi kerjanya	18,005	7,034	12,968	17,205						
			b. Jumlah non aparat pertanian yang meningkatkan kompetensi kerjanya	7,508	1,565	5,450	7,034						
			2. Jumlah aparat dan non aparat pertanian yang meningkatkan kompetensi kerjanya	7,508	1,565	5,450	7,034						
			ORANG :										
3	Meningkatnya kompetensi aparat pertanian dan non aparat	1. Jumlah aparat dan non aparat pertanian yang meningkatkan kompetensi kerjanya <td>25,513</td> <td>8,599</td> <td>18,418</td> <td>24,239</td> <td>25,477</td> <td>101,996,520,000</td> <td>31,332,934,358</td> <td>64,432,656,217</td> <td>85,762,673,117</td> <td>98,218,240,595</td>	25,513	8,599	18,418	24,239	25,477	101,996,520,000	31,332,934,358	64,432,656,217	85,762,673,117	98,218,240,595	
			ORANG :										
			a. Jumlah aparat pertanian yang meningkatkan kompetensi kerjanya	18,005	7,034	12,968	17,205						
			b. Jumlah non aparat pertanian yang meningkatkan kompetensi kerjanya	7,508	1,565	5,450	7,034						
			2. Jumlah aparat dan non aparat pertanian yang meningkatkan kompetensi kerjanya	7,508	1,565	5,450	7,034						
			ORANG :										
			a. Jumlah aparat pertanian yang meningkatkan kompetensi kerjanya	18,005	7,034	12,968	17,205						
			b. Jumlah non aparat pertanian yang meningkatkan kompetensi kerjanya	7,508	1,565	5,450	7,034						
			3. Jumlah aparat dan non aparat pertanian yang meningkatkan kompetensi kerjanya	7,508	1,565	5,450	7,034						
			ORANG :										
TOTAL													



DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PER 31 DESEMBER 2016

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Badan PPSDMP	1	0	1
2	Sekretariat Badan	99	61	160
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	37	37	74
4	Pusat Pendidikan Pertanian	17	25	42
5	Pusat Pelatihan Pertanian	21	29	50
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	134	58	192
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	40	37	77
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	109	48	157
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	141	70	211
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	117	41	158
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	64	33	97
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	47	20	67
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	73	45	118
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	53	22	75
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	66	27	93
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	53	37	90
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	62	28	90
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	47	17	64
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	49	21	70
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	57	24	81
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	42	21	63
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	57	26	83
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	40	17	57
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	52	10	62
TOTAL		1.478	754	2.232

Jakarta, 30 Desember 2016
a.n. Kepala Bagian Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001



**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PER 31 DESEMBER 2016**

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan											Jumlah
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Badan PPSDMP	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat Badan	2	23	61	2	2	11	-	-	47	7	5	160
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	2	19	39	-	-	1	-	-	13	-	-	74
4	Pusat Pendidikan Pertanian	5	9	18	2	-	1	-	-	7	-	-	42
5	Pusat Pelatihan Pertanian	2	14	20	-	1	2	-	-	10	1	-	50
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	3	32	35	-	1	2	1	-	65	24	29	192
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	3	26	16	4	-	7	-	-	19	1	1	77
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	11	39	25	18	-	4	-	-	33	16	11	157
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	8	45	54	29	1	7	2	-	50	6	9	211
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	10	46	17	19	1	12	-	-	40	5	8	158
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	4	38	22	18	-	3	-	-	12	-	-	97
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	2	17	23	8	-	3	-	-	7	2	5	67
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	1	32	46	3	1	6	-	-	25	2	2	118
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	-	20	19	7	-	5	-	-	16	3	5	75
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	3	17	26	10	-	7	-	-	24	2	4	93
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	1	22	31	8	-	6	-	-	18	2	2	90
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	1	22	26	2	-	3	-	-	26	5	5	90
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	-	8	20	5	-	2	-	-	22	4	3	64
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	-	11	20	8	-	3	-	-	26	-	2	70
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	18	19	9	-	1	-	-	31	-	3	81
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	-	11	31	-	-	5	-	-	13	2	1	63
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	-	14	32	7	-	4	-	-	20	4	2	83
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	13	20	2	-	2	-	-	17	3	-	57
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	-	10	19	9	-	-	-	-	17	3	4	62
TOTAL		58	507	639	170	7	97	3		558	92	101	2.232

Jakarta, 30 Desember 2016
a.n. Kepala Bagian Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001



**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
PER 31 DESEMBER 2016**

No	Unit Kerja	Golongan																				Jml
		I					II					III					IV					
		a	b	c	d	Total	a	b	c	d	Total	a	b	c	d	Total	a	b	c	d	e	Total
1	Badan PPSDMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat Badan	-	-	-	1	1	5	5	9	14	33	18	44	27	22	111	8	6	-	1	-	15
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	-	-	3	1	2	6	5	15	4	23	47	6	6	2	5	2	21
4	Pusat Pendidikan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	13	3	10	29	7	3	-	1	11
5	Pusat Pelatihan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	15	7	14	38	6	2	1	-	9
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	-	1	12	8	21	25	14	19	16	74	19	28	9	11	67	9	8	4	7	2	30
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	-	-	-	-	-	1	5	9	8	23	6	16	10	15	47	2	2	2	1	-	7
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	-	3	10	3	16	8	10	9	10	37	6	32	16	23	77	7	7	7	6	-	27
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	-	2	-	3	5	9	19	12	11	51	20	35	39	31	125	16	9	5	-	-	30
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	-	3	5	-	8	6	12	18	11	47	14	30	19	19	82	8	6	6	1	-	21
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	-	-	-	-	-	-	8	6	-	14	6	29	12	16	63	7	8	5	-	-	20
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	-	2	2	2	6	4	3	2	1	10	11	8	10	13	42	7	1	-	1	-	9
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	-	-	-	-	-	2	12	4	10	28	17	27	15	9	88	6	10	3	3	-	22
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	-	-	5	-	5	2	3	5	4	14	9	13	5	13	40	6	4	2	2	2	16
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	-	-	2	-	2	6	8	8	5	27	11	19	5	15	50	7	5	1	1	-	14
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	-	-	1	1	2	2	8	4	-	14	19	19	7	12	57	8	5	2	-	2	17
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Bat. Ingkulu	-	-	5	1	6	2	10	10	2	24	11	18	7	11	47	6	5	2	-	-	13
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	-	-	2	3	5	2	2	5	4	13	9	15	4	9	37	3	4	1	1	-	9
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	-	-	-	1	1	1	8	3	6	18	10	16	7	10	43	6	-	1	1	-	8
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	2	-	-	2	3	13	7	-	23	12	21	6	8	47	6	2	1	-	-	9
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	-	-	1	-	1	5	3	3	2	13	12	17	3	6	38	5	3	3	-	-	11
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	-	-	1	1	2	3	4	13	2	22	14	26	10	4	54	5	-	-	-	-	13
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	-	-	-	-	2	4	6	2	14	11	17	4	4	36	6	1	-	-	-	7
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	-	-	-	-	-	4	5	4	2	15	7	23	12	5	47	-	-	-	-	-	62
TOTAL		13	46	24	83	92	161	160	112	525	252	496	241	303	1,292	147	97	48	32	8	332	2,232

Jakarta, 30 Desember 2016
a.n. Kepala Bagian Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001



**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN ESELON DAN JENIS KELAMIN
PER 31 DESEMBER 2016**

NO.	UNIT KERJA	ESELON																		JUMLAH		TOTAL	
		1.a		1.b		2.a		2.b		3.a		3.b		4.a		4.b		5.a					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Badan PPSDMP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat Badan	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	6	6	-	-	-	-	9	8	17	
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	5	1	-	-	-	-	7	3	10	
4	Pusat Pendidikan Pertanian	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	6	-	-	-	-	4	6	10	
5	Pusat Pelatihan Pertanian	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	3	3	-	-	-	-	5	5	10	
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	3	4	-	-	-	-	5	6	11	
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	2	-	-	-	-	7	2	9	
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	2	-	-	-	-	7	2	9	
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	3	-	-	-	-	6	3	9	
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	8	1	9	
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	5	-	-	-	-	3	5	8	
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	2	-	-	-	-	7	2	9	
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	5	2	-	-	-	-	9	2	11	
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan'Hewan Cinagara	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	6	1	-	-	10	1	11	
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	4	-	-	-	-	7	4	11	
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	6	-	-	-	-	3	8	11	
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	5	2	-	-	-	-	8	3	11	
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	2	-	-	-	-	8	2	10	
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	6	1	-	-	-	-	10	1	11	
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	1	4	
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	1	4	
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
TOTAL		1	-	-	-	9	1	7	-	25	8	15	3	69	54	6	1	-	-	132	67	199	

Jakarta, 30 Desember 2016
a.n. Kepala Bagian Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001



**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN ESELON DAN JENIS KELAMIN
PER 31 DESEMBER 2016**

NO.	UNIT KERJA	ESELON																JUMLAH		TOTAL		
		1.a		1.b		2.a		2.b		3.a		3.b		4.a		4.b		5.a				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	Badan PPSDMP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat Badan	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	6	6	-	-	-	-	9	8	17
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	5	1	-	-	-	-	7	3	10
4	Pusat Pendidikan Pertanian	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	6	-	-	-	-	-	4	6	10
5	Pusat Pelatihan Pertanian	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	3	3	-	-	-	-	5	5	10
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	3	4	-	-	-	-	5	6	11
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	2	-	-	-	-	7	2	9
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	2	-	-	-	-	7	2	9
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	3	-	-	-	-	6	3	9
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	8	1	9
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	5	-	-	-	-	3	5	8
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	2	-	-	-	-	7	2	9
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	5	2	-	-	-	-	9	2	11
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	6	1	-	-	10	1	11
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	4	-	-	-	-	7	4	11
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	6	-	-	-	-	3	8	11
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	5	2	-	-	-	-	8	3	11
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	2	-	-	-	-	8	2	10
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	6	1	-	-	-	-	10	1	11
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	1	4
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	1	4
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
TOTAL		1	-	-	-	9	1	7	-	25	8	15	3	69	54	6	1	-	-	132	67	199



**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PER 31 DESEMBER 2016**

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan											Jumlah
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Badan PPSDMP	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat Badan	2	23	61	2	2	11	-	-	47	7	5	160
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	2	19	39	-	-	1	-	-	13	-	-	74
4	Pusat Pendidikan Pertanian	5	9	18	2	-	1	-	-	7	-	-	42
5	Pusat Pelatihan Pertanian	2	14	20	-	1	2	-	-	10	1	-	50
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	3	32	35	-	1	2	1	-	65	24	29	192
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	3	26	16	4	-	7	-	-	19	1	1	77
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	11	39	25	18	-	4	-	-	33	16	11	157
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	8	45	54	29	1	7	2	-	50	6	9	211
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	10	46	17	19	1	12	-	-	40	5	8	158
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	4	38	22	18	-	3	-	-	12	-	-	97
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	2	17	23	8	-	3	-	-	7	2	5	67
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	1	32	46	3	1	6	-	-	25	2	2	118
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	-	20	19	7	-	5	-	-	16	3	5	75
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	3	17	26	10	-	7	-	-	24	2	4	93
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	1	22	31	8	-	6	-	-	18	2	2	90
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	1	22	26	2	-	3	-	-	26	5	5	90
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	-	8	20	5	-	2	-	-	22	4	3	64
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	-	11	20	8	-	3	-	-	26	-	2	70
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	18	19	9	-	1	-	-	31	-	3	81
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	-	11	31	-	-	5	-	-	13	2	1	63
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	-	14	32	7	-	4	-	-	20	4	2	83
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	13	20	2	-	2	-	-	17	3	-	57
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	-	10	19	9	-	-	-	-	17	3	4	62
TOTAL		58	507	639	170	7	97	34	3	558	92	101	2232

Jakarta, 30 Desember 2016
a.n. Kepala Bagian Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001



DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PER 31 DESEMBER 2016

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Badan PPSDMP	1	0	1
2	Sekretariat Badan	99	61	160
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	37	37	74
4	Pusat Pendidikan Pertanian	17	25	42
5	Pusat Pelatihan Pertanian	21	29	50
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	134	58	192
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	40	37	77
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	109	48	157
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	141	70	211
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	117	41	158
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	64	33	97
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	47	20	67
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	73	45	118
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	53	22	75
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	66	27	93
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	53	37	90
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	62	28	90
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	47	17	64
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	49	21	70
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	57	24	81
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	42	21	63
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	57	26	83
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	40	17	57
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	52	10	62
TOTAL		1.478	754	2.232

Jakarta, 30 Desember 2016
a.n. Kepala Bagian Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001



**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
PER 31 DESEMBER 2016**

No	Unit Kerja	Golongan																Jumlah			
		I				II				III				IV							
		a	b	c	d	Total	a	b	c	d	Total	a	b	c	d	Total					
1	Badan PPSDMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
2	Sekretariat Badan	-	-	-	1	1	5	5	9	14	33	18	44	27	22	111	8	6	1	150	
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	-	-	3	1	2	6	5	15	4	23	47	6	6	2	74	
4	Pusat Pendidikan Pertanian	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	13	3	10	29	7	3	-	42	
5	Pusat Pelatihan Pertanian	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	15	7	14	38	6	2	1	50	
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	-	1	12	8	21	25	14	19	16	74	19	28	9	11	67	9	8	4	192	
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	-	-	-	-	-	1	5	9	8	23	6	16	10	15	47	2	2	1	77	
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	-	3	10	3	16	8	10	9	10	37	6	32	16	23	77	7	7	6	157	
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	-	2	-	3	5	9	19	12	11	51	20	35	39	31	125	16	9	5	211	
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	-	3	5	-	8	6	12	18	11	47	14	30	19	19	82	8	6	1	158	
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	-	-	-	-	-	-	8	6	-	14	6	29	12	16	63	7	8	5	97	
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	-	2	2	2	6	4	3	2	1	10	11	8	10	13	42	7	1	-	167	
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	-	-	-	-	-	2	12	4	10	28	17	27	15	9	68	6	10	3	118	
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	-	-	5	-	5	2	3	5	4	14	9	13	5	13	40	6	4	2	75	
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	-	-	2	-	2	6	8	8	5	27	11	19	5	15	50	7	5	1	93	
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	-	-	1	1	2	2	8	4	-	14	19	19	7	12	57	8	5	2	190	
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	-	-	5	1	6	2	10	10	2	24	11	18	7	11	47	6	5	2	90	
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	-	-	2	3	5	2	2	5	4	13	9	15	4	9	37	3	4	1	164	
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	-	-	-	1	1	1	8	3	6	18	10	16	7	10	43	6	-	1	70	
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	2	-	-	2	3	13	7	-	23	12	21	6	8	47	6	2	1	84	
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	-	-	1	-	1	5	3	3	2	13	12	17	3	6	38	5	3	3	163	
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	-	-	1	1	2	3	4	13	2	22	14	26	10	4	54	5	-	-	88	
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	-	-	-	-	2	4	6	2	14	11	17	4	4	36	6	1	-	57	
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	-	-	-	-	-	4	5	4	2	15	7	23	12	5	47	-	-	-	67	
TOTAL		13	46	24	46	133	92	161	160	112	525	252	496	241	303	1292	147	97	48	32	2232

Jakarta, 30 Desember 2016
a.n. Kepala Bagian Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001